



ANALISIS KOMPARATIF STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL (IFRS) DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Devi Lisyona Ramli

devilisyona.r@gmail.com

Universitas Bina Sarana Informatika

Malika Herlintang

malikaherlintang04@gmail.com

Universitas Bina Sarana Informatika

Reiviola Syahfiga Zaskia

reviolasyahviga29@gmail.com

Universitas Bina Sarana Informatika

Listi Khoirunnisa

listikhoirunnisa671@gmail.com

Universitas Bina Sarana Informatika

Zalfa Salsabila

zalfasalsabila457@gmail.com

Universitas Bina Sarana Informatika

Korespondensi penulis: devilisyona.r@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the differences and similarities between Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) and International Financial Reporting Standards (IFRS). The background of this study is the need for harmonization of accounting standards as an impact of globalization and market openness. This study uses a qualitative approach as the main method. The results of the study indicate that there are a number of significant differences between PSAK and IFRS, especially in terms of recognition, measurement, and disclosure of financial statements. However, there are also convergence efforts that have been made by the Indonesian Financial Accounting Standards Board in order to bring PSAK and IFRS closer together. This study concludes that convergence to IFRS provides benefits in increasing transparency, relevance and comparability of financial statements, although its implementation still faces technical and resource challenges.*

Keywords: *PSAK, IFRS, convergence, accounting standards, financial statements.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK) dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kebutuhan harmonisasi standar akuntansi sebagai dampak globalisasi dan keterbukaan pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah perbedaan signifikan antara PSAK dan IFRS, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan laporan keuangan. Namun demikian, terdapat pula upaya konvergensi yang telah dilakukan oleh Dewan Standar akuntansi Keuangan Indonesia dalam rangka mendekati PSAK dan IFRS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konvergensi terhadap IFRS memberikan manfaat dalam meningkatkan transparansi, relevan dan daya banding laporan keuangan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan sumber daya.

Kata Kunci: PSAK, IFRS, konvergensi, standar akuntansi, laporan keuangan.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, harmonisasi standar akuntansi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi dan daya saing pelaporan keuangan. *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sebagai standar akuntansi global telah diadopsi secara luas, termasuk oleh Indonesia melalui konvergensi dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) nasional. Meskipun telah terjadi peningkatan signifikan dalam penyelarasan ini, tantangan masih muncul akibat perbedaan sistem hukum, budaya, dan ekonomi. Sebagai ilustrasi, regulasi pajak di Indonesia kerap berdampak pada prosedur akuntansi, yang mengakibatkan ketegangan antara kepatuhan dan standar global. Disamping itu, usaha kecil di Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan IFRS karena keterbatasan sumber daya dan minimnya pengalaman.

Isu terkini yang krusial adalah pelaksanaan IFRS 17 dalam sektor asuransi di Indonesia yang mulai aktif sejak 1 Januari 2023. Standar ini mengharuskan perusahaan asuransi untuk memiliki pelaporan yang lebih sistematis, sistem data yang lebih canggih, dan sumber daya manusia yang mahir dalam bidangnya. Namun, menurut (Chris dayanti Br.Ginting, Yulia Fransiska Bangun, 2023) kurangnya infrastruktur data serta SDM akuntansi dan aktuaria yang mumpuni di Indonesia menjadi tantangan yang perlu dijawab oleh para pelaku industri agar siap menerapkan IFRS 17.

Selain itu, Indonesia juga tengah mengadopsi IFRS S1 dan S2 yang berfokus pada pengungkapan keberlanjutan dan risiko iklim. Kedua standar ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi keberlanjutan dengan laporan keuangan, dengan fokus pada pengungkapan tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta target dan metrik keberlanjutan perusahaan. Proses adopsi ini mendapat dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan serta membangun daya saing global yang lebih baik melalui ekosistem pelaporan yang terintegrasi.

Dalam konteks ini, analisis komparatif antara IFRS dan SAK menjadi penting untuk memahami sejauh mana konvergensi telah dicapai dan tantangan apa saja yang masih dihadapi. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan antara kedua standar tersebut, serta mengevaluasi dampak penerapan IFRS terhadap praktik akuntansi di Indonesia. Analisis komparatif ini tidak hanya terbatas pada struktur dan prinsip dasar antara IFRS dan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK), tetapi juga mencakup studi kasus penerapan IFRS 17 dan IFRS Sustainability Standards (S1 & S2) di Indonesia. IFRS 17, yang mengambil alih IFRS 4, dengan drastis mengubah metode perusahaan asuransi dalam menilai dan melaporkan kontrak asuransi, sehingga memberikan pengaruh besar terhadap pengakuan pendapatan, perhitungan kewajiban, serta sistem pelaporan yang menggunakan teknologi informasi (Natalis Christian, Friendly, Alfredo Cristiano, Angellyn Lim, 2021). Di sisi lain, standar keberlanjutan IFRS S1 dan S2 menuntut perusahaan untuk menyampaikan informasi yang relevan terhadap risiko lingkungan dan sosial yang dapat memengaruhi nilai ekonomi perusahaan dalam jangka panjang.

Adopsi standar-standar tersebut menimbulkan tantangan struktural, teknis, dan sumber daya yang kompleks di Indonesia, khususnya bagi perusahaan yang belum sepenuhnya siap dengan teknologi digital, pelatihan SDM, dan regulasi domestik yang masih berkembang. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan signifikan antara teori dan praktik dalam penerapan IFRS di Indonesia, sekaligus menawarkan analisis kritis terhadap kesiapan infrastruktur, regulasi, dan budaya akuntansi nasional dalam menghadapi penerapan keseluruhan terhadap norma internasional. Dengan demikian, temuan dari studi ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi kebijakan dan pendekatan adaptif bagi para pemangku kepentingan akuntansi di Indonesia (Nilasari, 2023).

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, penting untuk menelaah bagaimana proses konvergensi IFRS di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaporan keuangan, tetapi juga menyentuh dimensi kebijakan, kesiapan industri, dan literasi akuntansi. Perbandingan ini diharapkan dapat mengungkap bukan hanya perbedaan substansial antara IFRS dan SAK, tetapi juga bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi kualitas informasi keuangan yang disajikan oleh entitas di Indonesia. Pada akhirnya, analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan standar global tanpa mengorbankan konteks lokal yang khas, serta mengidentifikasi tantangan nyata dan peluang strategis dalam perjalanan menuju integrasi akuntansi internasional secara menyeluruh.

Di tengah dinamika globalisasi ekonomi yang kian rumit, penyelarasan standar akuntansi menjadi hal yang krusial guna mendorong transparansi serta memperkuat daya saing dalam pelaporan keuangan. International Financial Reporting Standards (IFRS) telah diterima secara luas sebagai acuan global dan diadaptasi oleh Indonesia melalui proses konvergensi dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) nasional. Meskipun telah terjadi peningkatan signifikan dalam penyelarasan ini, tantangan masih muncul akibat perbedaan sistem hukum, budaya, dan ekonomi. Sebagai ilustrasi, regulasi pajak di Indonesia sering berdampak pada kegiatan akuntansi, sehingga timbul perbedaan antara kepatuhan dan standar global. Di samping itu, usaha kecil di Indonesia bisa menghadapi tantangan dalam menerapkan IFRS akibat dari keterbatasan sumber daya dan minimnya pengalaman.

Implementasi IFRS 17 dalam industri asuransi di Indonesia, yang dimulai pada 1 Januari 2023, merupakan langkah penting menuju laporan keuangan yang lebih jelas dan terstruktur. Standar ini menuntut perusahaan asuransi untuk mengadopsi sistem data yang lebih canggih serta memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi dan aktuaria. Namun, menurut tantangan utama yang dihadapi industri asuransi Indonesia meliputi keterbatasan infrastruktur data dan kurangnya tenaga profesional yang memadai. Hal ini mengharuskan para pelaku industri untuk melakukan investasi dalam pengembangan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas SDM guna memastikan keberhasilan implementasi IFRS 17. Selain itu, Indonesia juga tengah mengadopsi IFRS S1 dan S2 yang berfokus pada pengungkapan keberlanjutan dan risiko iklim. Kedua standar ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi keberlanjutan dengan laporan keuangan, dengan fokus pada pengungkapan tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta target dan metrik keberlanjutan perusahaan. Proses adopsi ini mendapat dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan serta membangun daya saing global yang lebih baik melalui ekosistem pelaporan yang terintegrasi.

Dalam konteks ini, analisis komparatif antara IFRS dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia menjadi krusial untuk menilai sejauh mana proses konvergensi telah berlangsung dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menelusuri perbedaan dan kesamaan antara kedua kerangka standar tersebut, sekaligus mengevaluasi dampak implementasi IFRS terhadap praktik akuntansi di Indonesia. Analisis tidak hanya terbatas pada aspek struktural dan prinsip dasar yang membedakan maupun menyatukan IFRS dan SAK, melainkan juga memperluas cakupan pada studi kasus penerapan IFRS 17 serta IFRS Sustainability Standards (S1 dan S2). IFRS 17, sebagai pengganti IFRS 4,

membawa perubahan mendasar dalam pengukuran dan pelaporan kontrak asuransi, yang berimplikasi besar terhadap pengakuan pendapatan, estimasi kewajiban, dan penerapan sistem pelaporan berbasis teknologi. Sementara itu, IFRS S1 dan S2 menuntut pengungkapan informasi yang menyeluruh mengenai risiko lingkungan dan sosial yang dapat berdampak pada kinerja ekonomi perusahaan dalam jangka panjang, menandai pergeseran penting menuju pelaporan yang lebih berkelanjutan dan transparan.

Adopsi standar-standar tersebut menimbulkan tantangan struktural, teknis, dan sumber daya yang kompleks di Indonesia, khususnya bagi perusahaan yang belum sepenuhnya siap dengan teknologi digital, pelatihan SDM, dan regulasi domestik yang masih berkembang. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan signifikan antara teori dan praktik dalam penerapan IFRS di Indonesia, sekaligus menawarkan analisis kritis terhadap kesiapan infrastruktur, regulasi, dan budaya akuntansi nasional dalam menghadapi penyatuan sepenuhnya dengan norma internasional. Dengan demikian, temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi kebijakan dan pendekatan adaptif bagi para pemangku kepentingan akuntansi di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, penting untuk menelaah bagaimana proses konvergensi IFRS di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaporan keuangan, tetapi juga menyentuh dimensi kebijakan, kesiapan industri, dan literasi akuntansi. Perbandingan ini diharapkan dapat mengungkap bukan hanya perbedaan substansial antara IFRS dan SAK, tetapi juga bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi kualitas informasi keuangan yang disajikan oleh entitas di Indonesia. Pada akhirnya, analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan standar global tanpa mengorbankan konteks lokal yang khas, serta mengidentifikasi tantangan nyata dan peluang strategis dalam perjalanan menuju integrasi akuntansi internasional secara menyeluruh.

KAJIAN TEORI

Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses untuk mengenali, mencatat, encirikan, menyimpulkan, dan merinci pertukaran sedemikian rupa dan sengaja. Teori Akuntansi digunakan untuk mendasari tindakan akuntansi. Tujuannya adalah menjelaskan dan memperkirakan praktik akuntansi. Teori memberikan dasar yang rasional untuk tindakan praktis. Dengan demikian secara luas, proses teoritis dirancang untuk memahami dan menjelaskan fenomena. Akuntansi sangat tertanam dalam organisasi dan masyarakat. Teori Akuntansi bisa dijelaskan melalui berbagai sudut pandang. Teori Akuntansi kerap dipergunakan sebagai acuan dalam praktik akuntansi, dimana tujuan teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Teori Akuntansi sering digunakan sebagai acuan dalam praktik akuntansi. (Akuntansi et al., 2025)

Teori akuntansi adalah kumpulan prinsip, konsep, dan aturan yang digunakan untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi praktik akuntansi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teori akuntansi adalah dasar untuk merumuskan standar akuntansi yang menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi. Di samping itu, teori akuntansi juga memberikan panduan terhadap kemajuan kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan ekonomi serta keuangan, seiring dengan perubahan dan kemajuan dalam praktik. Ini menunjukkan bahwa akan ada pengaruh dari lingkungan dan

teori-teori lain yang terkait dengan informasi keuangan yang dapat memengaruhi perkembangan teori akuntansi. (Senastri Khaula, 2023)

Standar Akuntansi Keuangan Internasional (IFRS)

IFRS (Standar Pelaporan Keuangan Internasional) adalah seperangkat standar, penafsiran, dan kerangka yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan, yang diterima oleh IASB (Dewan Standar Akuntansi Internasional). Sebelumnya, IFRS dikenal dengan istilah Standar Akuntansi Internasional (IAS). Upaya untuk mengadopsi IFRS di Indonesia perlu didorong agar negara ini dapat memperoleh pengakuan yang optimal. Pengakuan yang optimal ini diperoleh dari komunitas global yang telah lama mengikuti standar tersebut. Perbedaan utama antara PSAK dan IFRS telah diperbaiki dengan mengizinkan penggunaan nilai wajar dalam PSAK. (Indriani et al., 2020)

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah kumpulan prinsip, ketentuan, dan pedoman yang digunakan untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan. SAK bertujuan untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dapat dipercaya, tepat, dan jelas, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca laporan keuangan, seperti investor, kreditur, manajemen, dan pengawas. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi, ketepatan, dan kehandalan laporan keuangan yang disiapkan oleh perusahaan. Standar ini mengatur cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa ekonomi dalam laporan keuangan. Di seluruh dunia, adopsi standar akuntansi yang kuat dan konsisten telah terbukti meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan. (Muslimah, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif sebagai pendekatan utama. Metode ini dipilih karena mampu memberikan akses luas ke berbagai sumber yang relevan dalam bidang teori akuntansi, termasuk buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengindektifikasi IFRS terhadap SAK dari sisi prinsip akuntansi

Dalam penelitian analisis penerapan International Financial Reporting Standards (IFRS) dapat ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, khususnya dalam hal transparansi, relevansi, dan komparabilitas. Setelah mengidentifikasi masalah utama, yaitu tantangan besar dalam mengadopsi dan mengimplementasikan IFRS secara penuh. dan menganalisis beberapa artikel penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Maka didapatkan hasil penelitian ini, yaitu penggunaan IFRS dapat meningkatkan komparabilitas laporan keuangan lintas batas, meningkatkan transparansi perusahaan, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami hasil keuangan entitas secara global, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dikarenakan standar IFRS lebih berorientasi pasar modal dan lebih komprehensif.

Adopsi IFRS juga memudahkan Perusahaan multinasional untuk berkomunikasi dengan perusahaan di berbagai negara, meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan, serta menyederhanakan tahapan akuisisi dan pelepasan. Tidak hanya itu, penerapan IFRS juga memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerjanya pada kompetitor globalnya, terutama saat persaingan global menjadi semakin ketat. Namun penerapan IFRS juga akan menyebabkan peningkatan rata-rata panjang laporan keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia karena persyaratan pengungkapan yang lebih maju dan kompleks.

Manfaat utama yang akan dinikmati perusahaan setelah mengadopsi IFRS yaitu peningkatan investasi asing langsung, peningkatan kualitas pelaporan, transparansi dan komparabilitas. Maka dari itu, bahwa pengadopsian IFRS dalam mempengaruhi pelaporan keuangan bisa meningkatkan peluang investasi baru dari investor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanto & Efrianti, (2017) bahwa standarisasi penyajian laporan keuangan yang mengikuti standar IFRS memaksa manajemen untuk mengungkapkan laporan keuangan secara lebih detail agar keseragaman bentuk laporan keuangan dapat terwujud sehingga memudahkan investor dalam membaca laporan keuangan memberikan keuntungan bagi perusahaan di dalam menarik minat investor sehingga kebutuhan akan kreditor dapat dikurangi.

Temuan penelitian ini juga mendukung argumentasi Yanti dkk., (2020) yang menyatakan bahwa manfaat yang didapat Indonesia jika mengadopsi IFRS, salah satunya adalah menghemat biaya pembuatan standar akuntansi dan menambah kualitas standar akuntansi Indonesia sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan dapat digunakan di dunia internasional.. Selain dari itu menurut Chairunnisa, (2019) semakin relevan informasi laporan keuangan akibat dari konvergensi IFRS maka kualitas laporan keuangan semakin meningkat, serta semakin besar pula pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan investasi bagi para investor. Sedangkan menurut Putri dkk., (2022) dan Suprihatin & Tresnaningsih, (2013) menunjukkan bahwa pemberlakuan IFRS telah dipersepsikan oleh investor sebagai adanya peningkatan kualitas laporan keuangan, khususnya kualitas angka nilai buku ekuitas dan angka laba. (Kualitas and Keuangan, 2025)

Menganalisis dampak adopsi IFRS terhadap kualitas pelaporan keuangan di Indonesia.

IFRS disusun dengan basis transaksi dan perlakuan khusus elemen laporan keuangan bukan industri, sehingga semua standar yang terkait dengan industri dihapus. Selain itu, PSAK yang tidak mengacu pada IFRS juga dihilangkan atau dibatalkan. Standar lain yang sudah ada tetapi tidak sesuai dengan IFRS diperbarui dan disesuaikan dengan ketentuan dalam IFRS yang terbaru.

Dampak Penerapan IFRS Terhadap Pengungkapan dan Penyajian Laporan Keuangan di Indonesia. Karena konvergensi IFRS telah membawa akuntansi ke tingkat yang baru, terdapat tiga perubahan penting, yaitu :

1. PSAK yang sebelumnya didasarkan pada Historical Cost kini telah beralih ke pendekatan Fair Value Based.

Historical Cost merupakan nilai yang disepakati atau harga yang dicatat dalam sistem pencatatan akuntansi. Prinsip Historical Cost mengharuskan penggunaan harga perolehan untuk mencatat aset, kewajiban, ekuitas, dan biaya. Yang dimaksud dengan harga perolehan adalah nilai tukar yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam

transaksi. Dalam pendekatan Historical Cost, nilai pasar yang mungkin didapatkan dari penjualan aset, yang dikenal sebagai nilai wajar, diabaikan sampai aset tersebut dijual. Perusahaan mencatat aset di neraca berdasarkan harga beli dikurangi akumulasi penyusutan yang terjadi setiap saat. Pada saat terjadinya penjualan, perusahaan mencatat laba atau rugi berdasarkan harga beli aset dikurangi penyusutan bila ada. Oleh karena itu, penerapan Historical Cost dianggap bisa mengurangi kualitas relevansi. Akibatnya, laporan keuangan tidak akan berguna untuk pengambilan keputusan. Oleh sebab itu Fair Value Based yang merupakan pendekatan yang berorientasi masa depan dimana perlu dilakukan penilaian kembali suatu aset, apakah terdapat penurunan nilai atas suatu aset pada sebuah periode pelaporan, perubahan-perubahan di PSAK untuk menyelaraskan dengan IFRS menjadi yang paling utama di samping hal-hal lainnya. Tujuan dari ini adalah untuk memastikan ketepatan laporan keuangan.

2. PSAK yang awalnya mengikuti pendekatan berbasis peraturan (seperti US GAAP) kini telah beralih ke pendekatan berbasis prinsip.

Laporan keuangan yang disusun dengan mengacu pada PSAK yang terinspirasi oleh US GAAP sudah tidak dipakai lagi di Indonesia. Saat ini, standar yang diterapkan telah disesuaikan dengan IFRS, di mana akuntansi berfokus pada prinsip, bukan lagi pada aturan yang ketat. Pendekatan berbasis prinsip dirancang untuk mencapai tujuan IFRS, yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan antara berbagai entitas di seluruh dunia. Perbedaan mendasar antara sistem berbasis aturan dan sistem berbasis prinsip ialah dalam sistem berbasis aturan, akuntan dapat mengikuti petunjuk pelaksanaan yang terperinci sehingga mengurangi kebingungan dan menghasilkan penerapan standar yang spesifik secara otomatis. Di sisi lain, dalam sistem berbasis prinsip, akuntan perlu membuat sejumlah perkiraan yang harus dipertanggungjawabkan dan mengharuskan penggunaan lebih banyak penilaian profesional.

3. Pemutakhiran (Update) PSAK.

Pemutakhiran Update dari PSAK untuk memunculkan transparansi dimana laporan yang dikeluarkan untuk eksternal harus cukup memiliki kedekatan fakta dengan laporan internal. Perusahaan wajib memberikan informasi penting dan krusial agar para pembaca laporan yang ditujukan untuk publik dapat menganalisis kondisi perusahaan dengan lebih akurat.

Perbedaan yang terlihat dalam laporan keuangan ini ada pada elemen-elemen yang membentuk laporan sebelum dan sesudah penerapan IFRS di Indonesia, yakni sebagai berikut. Komponen laporan sebelum dan setelah menerapkan IFRS:

1. Neraca, menjadi Laporan Posisi Keuangan.
2. Laporan Laba Rugi, menjadi Laporan Laba Rugi Komprehensif.
3. Laporan Perubahan Modal, menjadi Laporan Perubahan Ekuitas.
4. Laporan Arus Kas, menjadi Laporan Arus Kas.
5. Catatan Atas Keuangan, menjadi Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berbagai dampak konvergensi yang terjadi sebelum dan setelah penerapan IFRS pada cara penyajian laporan keuangan perusahaan meliputi:

1. Cakupan penganturan.
SAK diperuntukan untuk entitas yang bersifat profitorientend, Nirlaba, UKM (Usaha menengah kecil) yang disebut SAK-ETAP, dan Perusahaan berbasis syariah. Desain IFRS

ditujukan bagi perusahaan yang memiliki tujuan laba dan Usaha Kecil Menengah (UKM). IFRS masih belum menetapkan standar akuntansi untuk perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Efek konvergensinya akan ada penerapan standar yang bersifat setengah-setengah terhadap perusahaan yang berbasis syariah.

2. Pernyataan kepatuhan akan standar.

Dalam PSAK, organisasi tidak diwajibkan untuk menyusun pernyataan mengenai ketaatan terhadap SAK. Sementara itu, pada IFRS, organisasi diwajibkan untuk menyusun pernyataan yang jelas mengenai ketaatan terhadap standar IFRS. Efek konvergensinya ialah Harus dibuat pernyataan eksplisit akan kepatuhan pada PSAK di Catatan Atas Laporan Keuangan.

3. Prinsip ketepatan waktu (Timeliness).

Dalam PSAK, disarankan agar entitas dapat memperlihatkan laporan keuangan dalam waktu maksimum 4 bulan setelah tanggal neraca. Sedangkan di IFRS itu sendiri tidak diatur secara khusus kapan entitas menyajikan laporan keuangan. Maka efek konvergensinya perlu penyesuaian aturan terkait dengan kewajiban entitas untuk memenuhi. (Maulidayanti, 2023)

Pengaruh Faktor Budaya dan Ekonomi Indonesia terhadap Penerapan Standar Akuntansi Internasional

Penerapan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) di berbagai negara tidak terlepas dari pengaruh budaya serta kondisi ekonomi yang ada di masing-masing negara. Di Indonesia, kedua faktor ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana IFRS dapat diterima dan diterapkan secara efektif dalam praktik akuntansi.

Dari perspektif budaya, masyarakat Indonesia dikenal dengan nilai-nilai kolektivisme, adanya struktur hierarki yang kuat, serta penekanan pada keharmonisan dalam proses pengambilan Keputusan. Ahli mengungkapkan bahwa praktik akuntansi dalam analisis kejadian ekonomi sudah ada sejak awal perkembangan ekonomi dalam masyarakat manusia. Oleh karena itu, akuntansi Sejarah dimulai dengan munculnya pengalaman praktis dan diikuti oleh peningkatan Tingkat pengetahuan (Salamah et al., 2024). Hal ini berdampak pada proses pengambilan keputusan di dunia bisnis yang lebih sering bersifat sentralistik dan berfokus pada penghindaran konflik. Dalam praktik akuntansi, hal tersebut mengarah pada kecenderungan untuk membatasi pengungkapan informasi, terutama apabila informasi tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan, baik di dalam organisasi maupun dengan pihak luar. Pendekatan ini bertolak belakang dengan dasar-dasar IFRS yang menekankan pentingnya keterbukaan, pengungkapan yang lengkap, serta penyajian laporan keuangan yang mencerminkan keadaan ekonomi yang sesungguhnya. Sebagai akibatnya, terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip dasar IFRS yang lebih menekankan pada prinsip (*principle-based*) daripada penerapan aturan yang kaku.

Dari sisi ekonomi, tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah dominasi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak dari entitas ini yang menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga profesional yang terampil maupun infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk menerapkan standar akuntansi yang kompleks. Selain itu, biaya yang diperlukan untuk menerapkan IFRS menjadi hambatan, terutama bagi entitas yang masih beroperasi dalam sistem ekonomi informal. Oleh karena itu, proses konvergensi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap, selektif, dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta

kapasitas lokal melalui pengembangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berbasis IFRS.

Dengan mempertimbangkan dinamika budaya dan ekonomi ini, implementasi IFRS di Indonesia membutuhkan pendekatan yang memperhatikan konteks lokal. Proses adopsi standar internasional tidak hanya memerlukan penyesuaian teknis, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta harmonisasi kebijakan antara berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan institusi pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transisi menuju praktik pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar internasional namun tetap relevan dengan kebutuhan dan kondisi di tingkat domestik.

Analisis Perbedaan PSAK dan IFRS pada Laporan Keuangan di Indonesia

Akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan mengenai transaksi peristiwa ekonomi dan keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi, baik yang berorientasi pada keuntungan (profit) maupun yang tidak (non-profit), perlu dicatat dan diolah menjadi informasi yang berguna. Informasi ini nantinya akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi. Oleh karena itu, data yang disajikan harus mencerminkan kondisi organisasi secara akurat dan sesuai dengan kenyataan yang ada. (Dewi, 2021).

Untuk memastikan tersedianya informasi yang dapat diperbandingkan serta diterima secara nasional maupun internasional oleh penyusun dan pengguna laporan keuangan terutama para investor diperlukan adanya standar akuntansi yang berkualitas tinggi. Standar ini bertujuan untuk meminimalkan terjadinya ketimpangan informasi (asymmetric information) dan mencegah potensi penyimpangan perilaku seperti moral hazard. Dengan demikian, standar tersebut berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arahan serta mendorong terciptanya praktik bisnis yang sehat dan transparan. (Dewi, 2021).

International Accounting Standards Board (IASB) merupakan lembaga yang bertugas menyusun dan menerbitkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Selain IASB, terdapat beberapa lembaga internasional penting lainnya yang turut berperan dalam pengembangan standar akuntansi global, antara lain Uni Eropa (EC), Organisasi Pasar Modal Internasional (IOSCO), Komisi Eropa (EK), serta International Committee for Accounting Standards (ICAS). Tujuan utama dari lembaga-lembaga ini adalah untuk merumuskan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, mudah dipahami, serta memungkinkan perbandingan yang konsisten antar laporan keuangan di berbagai negara. (Cinta Nikita Aulia et al., 2024)

Terdapat perbedaan antara PSAK dan IFRS, terdapat sejumlah wawasan penting yang dapat diperoleh, khususnya dalam konteks laporan keuangan. Pertama, **perbedaan dalam standar akuntansi**. Meskipun baik PSAK maupun IFRS bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan andal, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek penerapan, pengakuan aset, kewajiban, serta pengungkapan informasi. IFRS lebih menekankan pendekatan berbasis prinsip (*principle-based*), sementara PSAK menggabungkan pendekatan berbasis prinsip dengan aturan yang lebih spesifik (*rule-based*). Kedua, **pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan**. Perbedaan pendekatan ini dapat memengaruhi kualitas informasi yang disajikan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS umumnya lebih mudah dibandingkan secara internasional, sehingga lebih relevan bagi investor global. Sebaliknya, laporan yang mengikuti

PSAK mungkin kurang familiar bagi investor asing karena terdapat elemen lokal dalam penerapannya. Ketiga, **tantangan dalam proses konsolidasi**. Ketika suatu entitas harus menyesuaikan laporan keuangannya agar selaras dengan kedua standar tersebut, proses konsolidasi menjadi lebih kompleks. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penyajian informasi keuangan dan berpotensi memengaruhi keputusan strategis, termasuk keputusan investasi. Ketiga, PSAK No. 22 mewajibkan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan entitas induk dan anak perusahaan, termasuk informasi mengenai keuntungan akuntansi yang digunakan. IFRS, di sisi lain, menetapkan kewajiban pengungkapan yang lebih rinci, terutama terkait dengan risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh entitas anak. Keempat, dalam PSAK, pos luar biasa masih dapat dipisahkan dalam penyajian laporan keuangan. Sementara itu, IFRS secara tegas melarang penggunaan pos luar biasa dalam laporan keuangan karena dianggap tidak relevan dengan prinsip penyajian wajar. Kelima, PSAK umumnya menggunakan metode biaya dalam pencatatan investasi pada anak perusahaan, sedangkan IFRS lebih mendorong penggunaan metode ekuitas untuk mencerminkan hasil investasi setelah pajak. Keenam, baik PSAK No. 65 maupun IFRS 10 mengatur konsolidasi laporan keuangan berdasarkan prinsip pengendalian. Namun, PSAK memberikan ruang lebih fleksibel dalam mengidentifikasi pihak pengendali, yang memungkinkan penyesuaian dengan praktik lokal di Indonesia. Ketujuh, dalam PSAK No. 22 Revisi 2019, metode konsolidasi yang digunakan adalah konsolidasi penuh, sejalan dengan ketentuan dalam IFRS No. 10. Meski demikian, IFRS tidak memperbolehkan metode konsolidasi proporsional, sedangkan PSAK tetap mempertahankan fleksibilitas tertentu, khususnya untuk menangani kombinasi usaha dalam satu grup ekonomi. Kedelapan, PSAK No. 15 mengatur penggunaan metode ekuitas dalam mencatat investasi pada entitas asosiasi, yang secara umum sejalan dengan standar IFRS. Akan tetapi, PSAK tetap membuka ruang penyesuaian sesuai dengan konteks lokal. Dalam metode ini, nilai investasi akan disesuaikan berdasarkan proporsi kepemilikan atas laba atau rugi entitas terkait. Kesembilan, baik IFRS 3 maupun PSAK No. 22 mengatur kombinasi bisnis. Namun, PSAK membedakan dua kategori yaitu akuisisi dan kombinasi kepentingan, sedangkan IFRS tidak membuat pemisahan tersebut. Kesepuluh, terkait tanggal pelaporan, IFRS mensyaratkan agar tanggal pelaporan entitas induk dan anak perusahaan harus sama. Jika tidak memungkinkan, maka laporan tambahan harus disertakan, dan selisih waktu maksimal hanya tiga bulan. PSAK mengadopsi prinsip ini, namun tetap mempertimbangkan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan domestik. Kesebelas, mengenai pengungkapan tambahan, IFRS mengharuskan penyajian informasi yang lebih lengkap, termasuk rincian mengenai hubungan induk-anak perusahaan serta elemen penting dalam laporan konsolidasi. PSAK No. 22 Revisi 2019 juga mengadopsi sebagian dari ketentuan tersebut, namun menyesuaikannya dengan karakteristik dan regulasi yang berlaku di Indonesia. (Sari et al., 2024) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyajikan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan, penyajian, serta pengungkapan informasi. IFRS cenderung menggunakan pendekatan berbasis prinsip (*principle-based*), yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi global. sementara PSAK lebih menggabungkan prinsip dan aturan. Untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman pelaporan keuangan di Indonesia, diperlukan pedoman praktis yang membantu perusahaan mengurangi perbedaan ini, serta mendukung harmonisasi standar akuntansi internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah perbedaan yang signifikan antara IFRS dan SAK (PSAK), terutama dalam hal prinsip pengukuran (historical cost vs. fair value), pendekatan standar (rule-based vs. principle-based), dan pengungkapan laporan keuangan. Meskipun demikian, Indonesia telah melakukan berbagai upaya konvergensi melalui adopsi penuh terhadap IFRS sejak 2012, guna meningkatkan kualitas, transparansi, dan daya banding laporan keuangan secara global.

Adopsi IFRS terbukti membawa manfaat besar dalam menyelaraskan praktik pelaporan keuangan dengan standar internasional. Namun, penerapannya tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, pengaruh budaya lokal, serta kondisi ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh UMKM. Selain itu, penerapan standar syariah juga menghadapi kendala konvergensi karena perbedaan mendasar dengan prinsip-prinsip IFRS, terutama terkait substansi mengungguli bentuk, nilai waktu uang, dan probabilitas pengakuan transaksi.

Dengan demikian, keberhasilan konvergensi IFRS di Indonesia sangat bergantung pada pendekatan yang kontekstual, penguatan kapasitas lembaga akuntansi, dan peningkatan literasi akuntansi di semua lini, agar harmonisasi standar ini benar-benar efektif dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. (Christian, Arlina, et al., 2024; Christian et al., 2005; Christian, Ong, et al., 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., Rinjani, D. F., & Haryadi, S. (2025). *Perkembangan teori akuntansi : tantangan dan peluang di era digital*. 2(3), 716–727.
- Chris dayanti Br.Ginting, Yulia Fransiska Bangun, K. G. (2023). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI INTERNASIONAL (IFRS) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI PERUSAHAAN PUBLIK: STUDI KASUS DI INDONESIA. *JURNAL NERACA*, 4(1), 1–6.
- Christian, N., Arlina, Tryany, J., Liang, V. L., & Rerung, Y. (2024). Analisis Komparatif Praktik Akuntansi di Iran dan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 152–162.
- Christian, N., Chandra, S., Tan, J., Julia, & Febriani, R. (2005). STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN : ANALISIS PERBANDINGAN INDONESIA DAN JERMAN DALAM PRAKTIK AKUNTANSI. *Jurnal Revolusi Ekonomi Dan Bisnis*, 7(7), 126–136.
- Christian, N., Ong, C. M., Wisely, J. V., Jaslyn, & Joan. (2024). ANALISIS PERBANDINGAN STANDAR AKUNTANSI DI NEGARA UNI EMIRAT ARAB DAN INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 46–64.
- Indriani, E., Ramadhani, R. S., & Astuti, W. (2020). Standar Akuntansi Keuangan Dan Praktik Manajemen Laba Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(2), 226–237. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i2.77>
- Juanda, A. (2012). *Kandungan prinsip konservatisme dalam standar akuntansi keuangan berbasis ifrs* (. 7, 24–34.
- Maulidayanti, E. (2023). *Dampak International Financial Reporting Standard (IFRS) terhadap Laporan Keuangan Perusahaan di Indonesia*. 3.
- Natalis Christian, Friendly, Alfredo Cristiano, Angellyn Lim, U. S. M. (2021). Perkembangan

**ANALISIS KOMPARATIF STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INTERNASIONAL (IFRS)
DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA**

Akuntansi Singapura Serta Analisis Financial Shenanigans Pada Blumont Group Ltd. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 84–95.

Nilasari, U. K. & A. P. (2023). Analisis implementasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 279–288.

Salamah, R., Umi Fikriyah, Kirana Mahardhika R., Nur Rohmah Hidayati, & Gunawan Aji. (2024). Sejarah Perkembangan Akuntansi di Indonesia. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(3), 01–19. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1467>

Muslimah, L. (2024) 'Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(5), pp. 918–923. Available at: <https://doi.org/10.47233/jeps.v4i5.2021>.

Senastri Khaula (2023) *Teori Akuntansi Dan Perkembangannya*, *Accurate.D*. Available at: <https://accurate.id/akuntansi/pembahasan-lengkap-teori-akuntansi/>.